

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Abdul Muid¹, Aghist Zumrotusa'adah², Aqila Zahra Rohmah³, Deviyanti Ika Wahyuningsih⁴.

abdul11muid@gmail.com

aghistzumrotus81@gmail.com

qilazahra126@gmail.com

deviyantiika@gmail.com

Abstrak:

Peninjauan terhadap kebijakan pendidikan memegang peran sentral dalam siklus kebijakan guna mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan dan sebagai dasar perumusan kebijakan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran evaluasi sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan pendidikan dan bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah konsep, model, dan pendekatan evaluasi serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya memberikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mengarahkan pada pengambilan keputusan berbasis data untuk perbaikan program di masa depan. Evaluasi yang dirancang secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dapat mendorong transformasi pendidikan yang adil dan berkualitas.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pendidikan, Implementasi, Pengembangan Kebijakan

PENDAHULUAN

Menilai kebijakan pendidikan merupakan langkah strategis untuk menentukan tingkat keberhasilan program dan kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya⁵. Evaluasi juga salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi kebijakan dan program pendidikan. Melalui evaluasi akan memperoleh sebuah informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah program. Temuan dari proses evaluasi kemudian dijadikan rujukan dalam menyempurnakan program yang telah berjalan⁶. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pendidikan, evaluasi memiliki peran penting untuk menilai sejauh mana evaluasi ini dapat

¹ Abdul Muid adalah Dosen Pascasarjana, (S2, S1), Universitas Qomaruddin Bungah Gresik, Dosen Pascasarjana & S1 STAI Arrosyid Surabaya, Ketua Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Boboh Menganti Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon NU Driyorejo Gresik, Anggota Majelis Ulama Kabupaten Gresik 2020-2026, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik, Wakil Ketua Tanfidziyah NU Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Pengurus Aswaja Center PCNU Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Pendidikan Komisi Pendidikan Kabupaten Gresik, dan Sekretaris Perjuangan Wali Songo Kabupaten Gresik.

² Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

³ Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

⁴ Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

⁵ Arimbi Pamungkas1, "Attractive : Innovative Education Journal."

⁶ Azam Jaysurrohman et al., "Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia."

memberikan gambaran mengenai efektivitas suatu program yang tergantung pada informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi tersebut. Informasi ini mencakup berbagai aspek seperti tujuan pendidikan, tingkat partisipasi siswa, serta dampak jangka panjang dan kebijakan yang diterapkan.

Evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya mencakup aspek konseptual, tetapi juga melibatkan monitoring atau pemantauan berkelanjutan sebagai bagian integral dari proses implementasi. Studi terbaru oleh Sarry dkk. (2024) menekankan bahwa efektivitas monitoring dan evaluasi (M&E) sangat ditentukan oleh metode pemantauan yang sistematis serta keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif⁷. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan M&E mampu mendeteksi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan ketimpangan implementasi antar sekolah, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk menguatkan sistem evaluasi ke depan. Selain itu, indikator keberhasilan evaluasi program pendidikan juga semakin berkembang, tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis siswa. Evaluasi harus dirancang secara menyeluruh dan adaptif, agar hasilnya dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kompleksitas dan kebutuhan riil di lapangan.

Penting untuk disadari bahwa keberhasilan evaluasi kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam merumuskan instrumen evaluasi dan ketajaman dalam menganalisis data yang diperoleh. Instrumen evaluasi harus mampu menangkap dinamika implementasi di berbagai level, baik pada tataran kebijakan pusat maupun praktik di tingkat satuan pendidikan. Ketidaktepatan dalam merumuskan instrumen dapat menyebabkan hasil evaluasi yang tidak akurat dan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan instrumen evaluasi perlu mempertimbangkan aspek validitas, reabilitas, serta sensitivitas terhadap konteks lokal dan karakteristik program yang dievaluasi.

Di sisi lain, keterlibatan berbagai aktor pendidikan dalam proses evaluasi juga menjadi kunci penting dalam menjamin keberhasilan evaluasi kebijakan. Guru, kepala sekolah, orang tua, hingga peserta didik memiliki perspektif dan pengalaman langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketika mereka dilibatkan secara partisipatif, hasil evaluasi akan lebih kaya dan representatif. Pendekatan evaluasi yang bersifat inklusif tidak hanya memperkuat kualitas data, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap kebijakan yang tengah diterapkan. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih tepat guna dan berkontribusi langsung terhadap

⁷ Situmorang, Damanik, and Darmansyah, "Efektivitas Monitoring Dan Evaluasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan : Pendekatan Dan Tantangan."

perbaikan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah, Meysihinur, dan Aziza (2023) bahwasanya aspek penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain pengertian, tujuan dan fungsi evaluasi, problematika dalam pelaksanaan evaluasi hingga model dan pendekatan yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek konseptual secara umum serta mengulas model-model evaluasi secara teoritis tanpa mengaitkannya secara langsung dengan efektivitas implementasi kebijakan dan pengembangan kebijakan kedepan⁸.

Berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada dua hal utama yaitu: (1) bagaimana evaluasi berperan sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan pendidikan, dan (2) bagaimana hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan perbaikan kebijakan pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan pentingnya evaluasi secara umum, tetapi juga mengeksplorasi nilai strategis evaluasi dalam siklus kebijakan pendidikan itu sendiri, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan dampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai pandangan serta temuan sebelumnya yang mendukung pemahaman mendalam mengenai evaluasi kebijakan pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara teori evaluasi dan praktik kebijakan di lapangan, serta untuk merumuskan implikasi praktis dari hasil evaluasi terhadap pengembangan kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EVALUASI SEBAGAI PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan atau proses menentukan nilai yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dengan kata lain evaluasi akan diketahui efektivitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya. Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah untuk

⁸ Azizah, Meysihinur, and Aziza, "EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN."

melihat kembali apakah suatu program dan kebijakan pendidikan itu telah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan⁹. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan secara efektif dan efisien. Proses ini bertujuan untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan kebijakan, sekaligus menyusun rekomendasi sebagai dasar perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan berfungsi sebagai referensi yang signifikan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi pendidikan yang lebih optimal¹⁰.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan mencakup berbagai unsur, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana. Kurikulum merdeka merupakan inovasi kebijakan pendidikan yang saat ini diimplementasikan, yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal masing-masing¹¹. Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, keterlibatan berbagai pihak sangat ditentukan oleh pola relasi antara perumus kebijakan dan pelaksana di lapangan. Proses evaluasi kebijakan mencakup peran dari tiga kelompok utama yaitu:

1. Perumus kebijakan. Perumus kebijakan sangat dominan bahkan cenderung mutlak, sehingga evaluasi atau arahan mereka harus diterima oleh pelaksana tanpa banyak perbedaan pendapat. Sebaliknya dalam struktur birokrasi yang lebih fleksibel dan interpersonal.
2. Pelaksana kebijakan. Pelaksana memegang peran evaluatif yang lebih besar, sementara peran perumus kebijakan menjadi relatif terbatas. Secara praktis, pelaksana memiliki pengaruh besar terhadap cara kebijakan dijalankan serta bagaimana proses evaluasinya berlangsung. Tingkat keterlibatan administrator dalam proses evaluasi sangat bergantung pada ruang diskresi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan. Meskipun secara normatif pelaksana bertanggung jawab atas hasil evaluasi.
3. Administrator. Dalam praktik administrasi tanggung jawab tersebut seringkali berada di tangan manajer atau pejabat administrative.

Kerjasama antar pihak formal dan nonformal seringkali terjalin dalam pelaksanaan evaluasi. Mereka dapat menyelenggarakan forum atau wadah diskusi yang dirancang untuk menghasilkan penilaian yang lebih mendalam. Beberapa pihak nonformal yang turut

⁹ Azam Jaysurrohman et al., "Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia."

¹⁰ Zuanda et al., "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan."

¹¹ Zuanda et al.

berperan dalam evaluasi kebijakan antara lain partai politik, organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, lembaga mediasi, mitra implementasi, individu dengan keahlian tertentu, serta media masa. Meskipun mereka tidak memiliki kedudukan struktural dalam membentuk opini publik serta mempengaruhi arah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Penilaian terhadap kebijakan pendidikan dapat mengadaptasi berbagai metode yang biasa digunakan dalam evaluasi kebijakan sektor publik, ada beberapa model yang bisa diterapkan atau untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan, antara lain:

1. *Goal Oriented Evaluation Model*. Dikembangkan oleh Tyler, model ini berfokus pada tujuan program yang telah ditetapkan sebelum program dijalankan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut.
2. *Goal Free Evaluation Model*. Dikembangkan oleh Scriven, model ini berlawanan dengan model pertama karena evaluasi dilakukan tanpa mengacu pada tujuan khusus. Menurut Scriven, yang penting adalah penampilan dari setiap langkah program, dengan mempertimbangkan tujuan umum yang ingin dicapai, bukan penilaian secara rinci.
3. *Formatif-Sumatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven
4. *Countenance evaluation model*, dikembangkan oleh Stake
5. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake
6. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
7. *CCIP Evaluation Model*, yang dikembangkan oleh Stufflebeam
8. *Discrepancy model*, yang dikembangkan Provus¹².

Dalam proses pelaksanaan berbagai model evaluasi kebijakan pendidikan tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain:

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan pendidikan, tanpa menilai manfaat atau nilai dari hasil tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai dianggap sudah terbukti atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi Formal

Pendekatan ini juga menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya, namun evaluasi dilakukan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah

¹² Azizah, Meysihinur, and Aziza, “EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.”

ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan pendidikan. Asumsinya adalah sasaran formal tersebut merupakan ukuran yang tepat untuk menilai manfaat dan nilai dari program dan kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoretis

Pendekatan evaluasi ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan pendidikan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi ini berusaha mengidentifikasi sasaran dan tujuan yang tersembunyi maupun yang dinyatakan oleh para stakeholder pendidikan.

Proses implementasi program dan kebijakan pendidikan memiliki fungsi dan tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Evaluasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan selaras dengan standar dan visi yang telah ditetapkan. dalam pendidikan seperti visi dan misi sekolah, rencana, keputusan, dampak dan program kedepannya. Sedangkan fungsi kebijakan pendidikan yaitu untuk menjadi patokan dalam mengambil sikap atau tindakan yang mengarahkan pendidikan, sekolah, organisasi bahkan pemerintah untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan sesuai rencana yang telah dibuat. Atas semua itu, terdapat tiga dimensi utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan, yaitu: aspek administratif, politik, dan hukum.

1. Administratif, adalah untuk mengukur dalam prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, umumnya lebih kepada bidang keuangan.
2. Politik, adalah untuk mengukur pertimbangan dalam politik dari kebijakam pendidikan itu sendiri
3. Yudisial, adalah mengukur semua objek-objek hukum, yang telah dilanggar atau tidak dilanggar¹³.

Hal yang sama disampaikan, evaluasi kebijakan pendidikan daat dibedakan menjadi:

1. Dalam menilai keberhasilan serta kegagalan akan sebuah kebijakan yang berlandasan kriteria dan standard yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Menentukan dampak yang diakibatkan dari kebijakan pendidikan dengan cara menggambarkan semua dampaknya¹⁴.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan secara efektif sangat efektif sangat bergantung pada akses terhadap data yang valid dan dapat diandalkan. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, melibatkan instrumen yang sesuai, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Tanpa

¹³ Azam Jaysurrohman et al., "Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia."

¹⁴ Azam Jaysurrohman et al.

data yang valid, proses evaluasi cenderung menghasilkan temuan yang bias dan menyesatkan. Oleh karena itu, dalam evaluasi kebijakan ada salah satu tantangan utama yaitu usaha membangun sistem informasi pendidikan yang kuat dan terintegrasi, agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan pencapaian dan permasalahan aktual dari implementasi kebijakan¹⁵.

Lebih lanjut, keberhasilan evaluasi juga ditentukan oleh keberanian dalam menindaklanjuti hasil temuan evaluatif. Evaluasi bukan hanya sekadar proses mengukur dan mencatat hasil, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis selanjutnya. Dalam konteks kebijakan pendidikan, evaluasi harus menjadi alat pengambilan keputusan yang adaptif dan progresif. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekeliruan dalam perencanaan atau pelaksanaan, maka harus ada komitmen untuk melakukan perbaikan, revisi, atau bahkan penghentian kebijakan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang lebih baik.

HASIL EVALUASI SEBAGAI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Hasil evaluasi kebijakan pendidikan menjadi dasar penting untuk pengembangan kebijakan selanjutnya. Evaluasi berfungsi sebagai sumber informasi untuk menilai keberhasilan kebijakan, mengenali hambatan pelaksanaannya, serta menyusun saran peningkatan¹⁶. Dengan kata lain, hasil evaluasi menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik dan membawa pengaruh yang konstruktif terhadap dunia pendidikan, serta memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih baik di masa depan. Hasil evaluasi tidak hanya berperan sebagai indikator, tetapi juga sebagai landasan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan, pengambil keputusan dapat membuat pilihan yang lebih didasarkan pada informasi mengenai pengembangan atau perubahan kebijakan pendidikan. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi kebutuhan siswa secara lebih efisien.

Evaluasi memberikan informasi mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan, penyesuaian, atau bahkan penyusunan kebijakan baru yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Melalui evaluasi, masalah dan tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan dapat teridentifikasi. Hal ini memungkinkan perbaikan atau penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Evaluasi kebijakan pendidikan juga bermanfaat dalam

¹⁵ Prabowo et al., "Evaluasi Kebijakan Pendidikan."

¹⁶ Yanti et al., "Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Keadilan Dalam Sistem Pendidikan Nasional."

meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan. Melalui masukan yang bersifat membangun, evaluasi memungkinkan sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk mengenali keunggulan dan kekurangan mereka, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Adapun masalah dalam evaluasi kebijakan pendidikan diantaranya:

1. Ketidakjelasan tujuan dalam perumusan kebijakan

Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk mengakomodasi beragam kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat. Akibatnya, konsensus yang dihasilkan cenderung bersifat kompromistis dan terpaksa, bukan merupakan kesepakatan yang lahir dari kesamaan pandangan.

2. Dampak konsensus yang dipaksakan terhadap kejelasan tujuan

Dalam upaya menyatukan berbagai kepentingan, rumusan kebijakan menjadi terlalu umum dan tidak spesifik, sehingga menyulitkan dalam hal implementasi dan pengukuran keberhasilan. Ketika tidak ada kesepakatan yang solid, para pihak yang berkepentingan cenderung menolak rumusan kebijakan yang ada.

3. Ambiguitas masalah dan akar permasalahannya

Terjadinya isu-isu sosial yang bersifat kompleks dan dinamis, dimana persepsi serta sudut pandang antar individu atau kelompok bisa beragam, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya ambiguitas dalam perumusan kebijakan.

Berkenaan dengan pengukuran dalam evaluasi kebijakan pendidikan, menyangkut dalam pemakaian konsep tertentu selaku sebuah alat guna mengukur tingkat keberhasilan serta kegagalan sebuah program. Contohnya persoalan efektivitas sangat sulit jika dilihat terutama yang berkenaan tingkat kualitasnya. Kelompok sasaran yang harus diperhatikan yaitu program walaupun berakibat secara menyeluruh dalam populasi sasaran. Akan tetapi tidak semua mempunyai dampak pada kelompok sasaran. Namun sering terjadi bukan pada kelompok target yang mendapat manfaat akan kebijakan itu, namun kelompok lain pada populasi itu yang terkadang diakibatkan oleh *bias biokrasi*. Permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat terlihat dari perkembangan mutu pembelajaran dan pencapaian akademik siswa. Meski demikian, evaluasi turut menunjukkan adanya kesenjangan capaian akademik antara sekolah yang memiliki fasilitas memadai dan belum tercukupi. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang merata bagi seluruh siswa tanpa pengecualian¹⁷.

¹⁷ Zuanda et al., "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan."

Dalam penerapan kebijakan berbasis data (*evidence based policy*), hasil evaluasi memiliki peran penting dalam mendorong perubahan yang berkesinambungan. Proses evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan adanya mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sistem pendidikan. Dengan mengadopsi prinsip ini, kebijakan tidak lagi bersifat reaktif atau berbasis asumsi, melainkan lebih reflektif terhadap dinamika kebutuhan riil di lapangan, termasuk adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, maupun teknologi dalam pendidikan.

Selanjutnya, hasil evaluasi juga penting dalam mendesain intervensi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, apabila ditemukan adanya kesenjangan prestasi antara wilayah urban dan rural, maka kebijakan dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas sekolah di wilayah tertinggal. Evaluasi yang baik bukan hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai panduan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok yang kurang beruntung, demi mewujudkan pemerataan kesempatan belajar¹⁸. Dengan begitu, fungsi evaluasi sebagai instrumen kontrol dan perbaikan kebijakan akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Akhirnya, keberhasilan evaluasi kebijakan pendidikan juga bergantung pada komitmen dari pengambil kebijakan untuk benar-benar menindaklanjuti hasil evaluasi secara objektif dan konsisten. Hasil evaluasi yang tidak direspons dengan tindakan nyata hanya akan menjadi dokumentasi administratif yang kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan koordinasi lintas lembaga yang kuat agar rekomendasi evaluasi dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Penguatan kelembagaan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi menjadi kunci utama agar kebijakan pendidikan yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu membawa transformasi yang bermakna.

KESIMPULAN

Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan adalah elemen krusial dalam siklus perumusan kebijakan publik. Evaluasi ini tidak hanya menjadi sarana pengukuran keberhasilan program, tetapi juga berperan strategis dalam memberikan masukan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Melalui berbagai model dan pendekatan evaluasi, seperti *model goal oriented*, *goal free*, hingga evaluasi teoretis, proses ini mampu mengidentifikasi kelemahan dan potensi kebijakan yang telah dijalankan. Hasil evaluasi juga berperan sebagai landasan untuk merumuskan

¹⁸ Fionita et al., "Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan."

kebijakan baru yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di berbagai tingkat.

Namun, pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan tidak lepas dari tantangan, seperti ketidakjelasan tujuan kebijakan, ambiguitas permasalahan, serta ketimpangan implementasi antar wilayah atau lembaga. Dalam praktiknya, efektivitas evaluasi sangat bergantung pada kualitas data, keberpihakan evaluasi terhadap kelompok sasaran, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan nyata. Penilaian kebijakan yang dirancang secara komprehensi, melibatkan berbagai pihak, dan terus menerus dilakukan akan memberikan dampak nyata bagi pengembangan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.

REFERENSI

- Arimbi Pamungkas¹, Ahmad Tohir. “Attractive : Innovative Education Journal.” *Students’ Difficulties at Elementary School in Increasing Literacy Ability* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Azam Jaysurrohman, Robit, Muhammad Supandi, Muhammad Tedi Wardani, Muhaimi Puthaen, and Farid Setiawan. “Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia.” *BINTANG : Jurnal Pendidikan Dan Sains* 3, no. 2 (2021): 215–27. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.
- Azizah, Naila Nur, Meysihinur, and Miftah Aziza. “EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN.” *Ta’Lim* 2, no. 2 (2023): 13–27.
- Fionita, Winda, Rara Lauchia, Septia Windari, and Hansein Arif Wijaya. “Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 6 (2024): 5732–39. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4535>.
- Prabowo, Rizky, Farid Setiawan, Joni Mukti Wibowo, Risma Oktarina, and Nurul Anisa Rahmadia. “Evaluasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 8 (2022): 901–7. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>.
- Situmorang, Mela Safitri, Aulia Sari Damanik, and Tengku Darmansyah. “Efektivitas Monitoring Dan Evaluasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan : Pendekatan Dan Tantangan.” *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika* 3, no. 1 (2025): 152–61.
- Yanti, Annisa Darma, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, and Elly Marlina. “Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Keadilan Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Journal of Islamic Education El Madani* 4, no. 1 (2024): 47–52.
- Zuanda, Sary, Dewi Wulandari Fahrezi, Gilang Fabiola Rised, and Muhammad Syaifuddin. “Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 27207–18.